

NAMA : BETRIS OKTARINI ARISTA

NPM : 2216041140

KELAS : REG D

PENERAPAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM PENINGKATAN EFISIENSI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komponen kunci dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya yaitu dengan menciptakan pemerintahan yang efektif dan transparan. Pemerintahan suatu negara yang sukses yaitu dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyatnya, menyediakan layanan publik berkualitas tinggi, dan memastikan alokasi dana harian yang akurat. Namun seiring berjalannya waktu tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam proses administrasi negara akan semakin meningkat. Salah satu peran pemerintah yang paling penting dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan di Indonesia adalah bantuan sosial. Baik pemerintah maupaun organisasi non-pemerintah dan lembaga amal biasanya menyediakan dana untuk kesejahteraan sosial guna membantu individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Namun permasalahan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial adalah kurangnya transparansi dana penyaluran bantuan sosial dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Problematika yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial antara lain adalah proses penyaluran yang rumit, yang menjadi salah satu masalah utamanya adalah kompleksitas proses administratif yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial dimana transparansi dapat terganggu karena keterlambatan dan kerumitan. Proses penyaluran

dikatakan rumit karena harus melewati beberapa langkah yang diperlukan dalam proses ini sehingga melibatkan banyak lembaga pemerintah yang berbeda. Permasalahan ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, khususnya dalam hal distribusi bantuan sosial, merupakan isu yang memengaruhi banyak negara dan komunitas di seluruh dunia. Proses penyelenggaraan bantuan sosial yang dianggap rumit telah menjadi penyebab utama kecemasan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mengakibatkan kompleksitas dalam proses ini dan dampaknya terhadap masyarakat. Kita harus menyadari bahwa kompleksitas dalam penyaluran bantuan sosial bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Ini seringkali disebabkan oleh sejumlah faktor yang terhubung satu sama lain. Salah satu faktor utama adalah birokrasi yang terlibat dalam proses ini. Birokrasi pemerintah atau organisasi yang mengelola bantuan sosial sering melibatkan prosedur panjang dan rumit yang membutuhkan banyak dokumen, persetujuan, dan verifikasi. Hal ini dapat menghambat aliran bantuan kepada penerima yang membutuhkannya. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial juga menjadi kendala. Ketidakjelasan dalam pemantauan dan pelaporan penggunaan dana bantuan dapat menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Ketika orang merasa tidak yakin mengenai cara dana bantuan mereka digunakan atau apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada penerima yang seharusnya, ini dapat menimbulkan rasa cemas dan ketidakpuasan. Kompleksitas juga muncul dari peraturan dan persyaratan yang berbeda di setiap tingkat pemerintahan atau organisasi yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial. Setiap entitas mungkin memiliki aturan dan regulasi sendiri, yang menjadikan proses semakin rumit. Penerima bantuan sering harus menghadapi tumpang tindih dalam persyaratan atau bahkan perbedaan dalam kriteria kelayakan di berbagai wilayah. Masalah teknis juga dapat menjadi penyebab rumitnya proses penyaluran bantuan sosial. Sistem yang digunakan untuk melacak dan mendistribusikan bantuan dapat menjadi rumit dan rentan terhadap kegagalan teknis. Ini dapat mengakibatkan penundaan dalam penyaluran bantuan dan meningkatkan frustrasi di kalangan penerima yang sudah berjuang dengan situasi sulit.

Dampak dari proses penyaluran bantuan sosial yang rumit dan kurang efisien sangat berdampak pada masyarakat. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya ketidaksetaraan sosial. Ketika bantuan tidak disalurkan dengan tepat waktu dan efektif kepada mereka yang membutuhkan, kelompok yang sudah terpinggirkan dalam masyarakat dapat semakin terpinggirkan. Ini dapat memperburuk masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi.

Ketidakpastian dalam penyaluran bantuan sosial juga dapat menciptakan tekanan psikologis pada masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian mengenai masa depan mereka dan menghadapi kesulitan ekonomi sering mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik mereka. Selain itu, ketidakpuasan terhadap proses penyaluran bantuan sosial dapat mengganggu stabilitas sosial. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan, hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan aksi protes. Ketidakpuasan ini juga berpotensi merambat menjadi ketidakstabilan politik. Pemerintah harus berupaya untuk menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas. Ini dapat melibatkan pembaruan regulasi, investasi dalam teknologi yang lebih efisien, dan pelatihan yang lebih baik bagi staf yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Selain itu, masyarakat juga harus aktif terlibat dalam memantau dan memberikan umpan balik terkait proses penyaluran bantuan sosial, sehingga perbaikan dapat terus dilakukan. Masalah kompleksitas dalam proses penyaluran bantuan sosial adalah permasalahan yang memengaruhi masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi nirlaba, dan masyarakat. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menjalankan proses penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien dan memberikan bantuan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini juga karena kurangnya koordinasi antar instansi dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, yang pada akhirnya mempengaruhi transparansi pada proses penyaluran dana bantuan sosial. Kurangnya transparansi dalam konteks penyaluran bantuan sosial berarti bahwa prosedur atau sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada penerima tidak dilakukan secara jelas dan terbuka. Hal ini menghambat akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk memahami bagaimana dana bantuan tersebut biasanya digunakan. Misalnya, sulit untuk memahami siapa penerima bantuan sosial, berapa banyak uang yang mereka peroleh, atau bagaimana mereka akan menggunakan donasi tersebut setelah donasi tersebut diberikan kepada mereka. Karena kurangnya transparansi, sulit bagi pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat umum atau badan pemerintahan, untuk menilai dan memverifikasi bahwa bantuan sosial memang diperlukan dan digunakan secara tepat oleh mereka yang menerima. Selain itu, ketidaktransparan ini meningkatkan risiko data yang ada mengalami kehilangan. Orang lain atau oknum yang tidak berwenang dapat mengambil alih data orang lain untuk menggunakan kesempatan ini dan melakukan kejahatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku.

Pemerintah seringkali tidak mempunyai data yang akurat dan terkini padahal data yang akurat dan terkini sangat penting dalam pengalokasian dana program kesejahteraan sosial secara akurat, maka pemerintah harus memiliki informasi tersebut. Informasi tentang pentingnya data yang akurat dan masalah yang mungkin timbul jika data tidak lengkap atau tidak akurat akan menimbulkan masalah baru. Data yang benar dan akurat ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi secara akurat siapa saja yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Hal ini memastikan bantuan sosial itu valid diberikan kepada mereka atau kelompok yang benar-benar membutuhkannya sekaligus mencegah bantuan salah sasaran ke orang lain yang tidak membutuhkannya. Data yang akurat adalah data yang bisa membantu pemerintah melaksanakan pengalokasian sumber daya secara efisien, mencegah penyalahgunaan sumber daya yang ada, dan memastikan penggunaannya sebagaimana mestinya. Membantu pemerintah melaksanakan pengalokasian sumber daya secara efisien, mencegah penyalahgunaan dana, dan pengalokasian yang tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial yang kurang akurat dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk keadilan Sosial yang tidak terealisasi. Ketidaktepatan dalam pemberian bantuan sosial dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial karena mereka yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa saja tidak mendapatkannya, sementara yang seharusnya tidak memenuhi syarat justru menerima bantuan. Kurang tepatnya alokasi bantuan dapat mengakibatkan pemborosan dana publik, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membantu yang memerlukan dapat terbuang secara tidak efisien. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-program sosial. Masyarakat mungkin merasa bahwa uang mereka tidak digunakan dengan baik. Jika bantuan sosial tidak tepat sasaran, maka individu yang seharusnya mendapat kesempatan untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka bisa terus berjuang dalam kemiskinan, sementara yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan justru menerima lebih banyak. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial dapat membuka peluang bagi kecurangan, baik dari pihak penerima maupun penyelenggara program, yang dapat merugikan sistem secara keseluruhan. Bantuan yang tidak sesuai sasaran dapat mengurangi efektivitas program bantuan sosial dalam mencapai tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang sering terjadi lainnya adalah penyalahgunaan program bantuan sosial dimana ini adalah permasalahan yang sangat serius dan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial suatu negara. Ketika program-program ini tidak dijalankan dengan benar dan tidak adil, maka masyarakat yang pada dasarnya seharusnya mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut bisa merasa terpinggirkan, dan hasilnya adalah meningkatnya tingkat

ketidakpuasan. Sangat penting untuk memahami bahwa program-program bantuan sosial seharusnya memiliki tujuan utama, yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam masyarakat. Sasarannya adalah mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Namun, ketika program-program tersebut disalahgunakan atau tidak dikelola dengan baik, maka dampak negatifnya dapat meluas dan merasuki berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu dampak yang paling terlihat dari penyalahgunaan program bantuan sosial adalah munculnya ketidakadilan sosial. Bantuan yang semestinya diberikan kepada individu atau kelompok yang benar-benar membutuhkan bisa saja tidak sampai kepada mereka dengan benar. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang seharusnya tidak memenuhi syarat atau yang kurang membutuhkan justru menerima bantuan tersebut. Situasi semacam ini menciptakan ketidakadilan sosial yang nyata. Masalah ini tidak hanya berkisar pada aspek statistik, melainkan juga mengandung dimensi etis yang bisa memicu rasa ketidakpuasan yang tinggi di kalangan warga negara. Ketidakpuasan yang muncul, jika tidak ditangani dengan baik, bisa berkembang menjadi protes sosial yang kuat. Ketika masyarakat mulai merasa bahwa pemerintah tidak bersikap adil dalam mendistribusikan bantuan, mereka cenderung bersatu untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Demonstrasi jalanan, mogok, dan aksi protes menjadi bentuk-bentuk ekspresi yang seringkali muncul dalam konteks seperti ini. Media sosial dan teknologi modern yang memungkinkan pesan ketidakpuasan menyebar dengan cepat, mendorong munculnya gerakan-gerakan yang lebih besar dan lebih efektif. Ketegangan sosial juga muncul sebagai dampak dari penyalahgunaan program bantuan sosial. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan akibat ketidakadilan dan tidak puas dengan kinerja pemerintah, hubungan antarindividu serta antarkelompok dalam masyarakat bisa menjadi tegang. Ketegangan ini dapat menciptakan perpecahan yang lebih dalam antara kelompok sosial, etnis, atau agama. Ini berpotensi memicu konflik internal yang mengancam stabilitas sosial. Yang lebih serius lagi, penyalahgunaan program bantuan sosial bisa berujung pada kerusuhan sosial. Ketika tingkat ketidakpuasan mencapai puncaknya dan ketegangan mencapai titik tertentu yang tidak dapat ditoleransi, maka masyarakat bisa melampiaskan kemarahan mereka melalui tindakan kekerasan. Kerusuhan sosial dapat mengancam nyawa dan harta benda, dan juga dapat mengganggu stabilitas politik secara keseluruhan. Kasus-kasus sejarah di berbagai negara menunjukkan betapa merusaknya dampak dari kerusuhan sosial. Selain dampak langsung yang dapat memicu kerusuhan sosial, penyalahgunaan program bantuan sosial juga bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan merupakan dasar dari hubungan yang sehat antara pemerintah dan

rakyatnya. Ketika warga merasa bahwa pemerintah tidak dapat diandalkan atau tidak adil dalam menjalankan program-program bantuan sosial, hal ini bisa merusak dasar kepercayaan tersebut. Kerusakan dalam kepercayaan ini dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan pemulihannya mungkin menjadi tugas yang sangat sulit. Dampak lain yang harus diperhatikan adalah ketidakpastian ekonomi. Jika bantuan tidak tersalurkan dengan benar, maka individu dan keluarga yang seharusnya mendapatkan dukungan ekonomi dapat terus merasakan penderitaan. Hal ini dapat menghambat kemajuan ekonomi mereka dan memperlebar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Ketidakpastian ekonomi ini dapat menimbulkan tekanan tambahan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penyalahgunaan program bantuan sosial membuka peluang luas untuk terjadinya kecurangan dan penipuan. Baik penerima bantuan maupun petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program bisa tergoda untuk memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi. Ini tidak hanya merugikan dana publik, tetapi juga dapat merusak integritas program-program tersebut. Penyalahgunaan program bantuan sosial dapat mengurangi efektivitas program tersebut. Program-program ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika bantuan tidak disalurkan dengan benar, program tersebut menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Hal ini berarti upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mungkin akan gagal mencapai hasil yang diharapkan, sehingga uang pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.

Keterbukaan dalam penggunaan dana sosial juga termasuk hal yang sangat penting dalam konteks penyaluran bantuan ke masyarakat. Ini mencerminkan dalam sejauh mana dana yang dialokasikan oleh pemerintah atau lembaga amal digunakan dengan benar dan efisien untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sayangnya, masalah terkait dengan kurangnya transparansi dana sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan dampaknya yang positif. Sebelum kita melanjutkan, perlu dipahami bahwa transparansi dana mengacu pada tingkat keterbukaan dan kejelasan informasi terkait dengan sumber daya finansial yang diterima, dialokasikan, dan digunakan dalam rangka program bantuan sosial. Ini mencakup pengungkapan tentang dana yang disediakan oleh pemerintah, sumbangan dari individu atau organisasi swasta, serta rincian tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk berbagai tujuan seperti bantuan makanan, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Ketidaktransparan dalam penyaluran dana sosial memiliki dampak

yang serius pada masyarakat. Salah satu konsekuensi utamanya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga amal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program tersebut. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai penggunaan dana, hal ini dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. Masyarakat mungkin merasa bahwa dana tidak dikelola dengan benar atau bahkan dicurangi oleh pihak yang terlibat dalam penyaluran dana. Dampak yang sangat merugikan adalah terkait dengan ketidakpercayaan ini, yang bisa berdampak jangka panjang. Masyarakat yang merasa bahwa dana bantuan tidak digunakan secara efisien dan adil mungkin akan meragukan program-program bantuan sosial tersebut. Mereka dapat merasa bahwa uang pajak yang mereka bayar tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, yang pada gilirannya dapat mengurangi dukungan publik terhadap program-program tersebut. Konsekuensinya, program-program tersebut mungkin tidak mencapai tujuan mereka dengan efektif, seperti mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketidaktransparan dalam penyaluran dana sosial menciptakan peluang untuk penyalahgunaan dana. Ketika tidak ada pengawasan yang memadai atau ketika informasi tentang penggunaan dana tidak tersedia untuk umum, ada risiko munculnya tindakan penipuan, korupsi, atau alokasi dana yang tidak efisien. Ini merupakan masalah yang sangat serius, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan bisa terbuang percuma atau bahkan jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, ketidaktransparan dalam penyaluran dana sosial juga dapat menghambat upaya pemantauan dan evaluasi program. Untuk mengukur efektivitas program bantuan sosial, penting memiliki akses yang tepat waktu dan akurat terhadap data mengenai penggunaan dana dan dampaknya. Ketika data ini tidak transparan, sulit bagi pihak berwenang, peneliti, atau masyarakat umum untuk melakukan evaluasi yang obyektif dan efisien. Masalah transparansi dana juga bisa merugikan reputasi pemerintah atau lembaga amal yang terlibat dalam penyaluran dana sosial. Ketika masyarakat meragukan bagaimana dana dikelola, ini dapat merusak citra dan reputasi institusi tersebut. Ini juga dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk mengumpulkan sumbangan atau dukungan tambahan dari pihak swasta atau individu yang ingin berkontribusi pada program-program tersebut. Selain itu, teknologi modern dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan program bantuan sosial. Tanggung jawab besar diemban oleh pemerintah dalam menjalankan program bantuan sosial, yang harus dijalankan dengan efektif dan efisien. Salah satu aspek krusial yang harus dipertimbangkan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program ini. Mengapa

keterlibatan masyarakat menjadi begitu penting? Pertama-tama, masyarakat adalah penerima utama bantuan ini dan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan mereka sendiri. Dengan melibatkan mereka, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang ada. Partisipasi masyarakat juga memberikan kontribusi positif terhadap transparansi program. Ketika masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program, ini berperan dalam mencegah penyalahgunaan dana dan praktik-praktik yang tidak jujur. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, mengurangi ketidakpercayaan, dan mendorong dukungan masyarakat pada pemerintah. Sangat penting memiliki mekanisme yang tepat untuk mengelola partisipasi masyarakat ini. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap umpan balik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat dihargai dan diambil tindakan yang sesuai dengannya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemantauan program bantuan sosial merupakan langkah esensial menuju kesuksesan program ini. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai yang membutuhkan, tetapi juga berdampak positif pada transparansi, kepercayaan, dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan program dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan. Pemerintah dan lembaga amal harus membuka pintu untuk menerima masukan dari warga negara dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan umpan balik yang diberikan. Pihak berwenang juga harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan program bantuan sosial. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan program dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan. Pemerintah dan lembaga amal harus membuka pintu untuk menerima masukan dari warga negara dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan umpan balik yang diberikan. Dalam rangka mencapai efektivitas dan integritas program bantuan sosial yang lebih baik, perlu ditekankan bahwa peningkatan transparansi dana merupakan langkah yang sangat penting. Dengan demikian, dana sosial dapat digunakan dengan lebih efisien dan adil untuk membantu mereka yang membutuhkan, sementara juga membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut. Platform online atau aplikasi dapat digunakan untuk melacak dan melaporkan penggunaan dana secara real-time. Ini memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memahami bagaimana dana digunakan dan untuk memantau program-program tersebut.

Alhasil, pengembangan teknologi blockchain menjadi semakin penting dan memiliki manfaat dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran dana untuk tujuan sosial. Inovasi terbaru, yang dikenal sebagai teknologi Blockchain. Blockchain adalah sistem distribusi data yang terdesentralisasi dan aman, yang mencatat transaksi secara transparan dengan menghubungkan blok-blok data yang berisi informasi transaksi yang tidak dapat diubah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana penerapan teknologi blockchain dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan cara suatu negara menjalankan program pemerintahannya. Dengan menggunakan teknologi digital yang memungkinkan penciptaan dan perluasan kontrak digital untuk mencatat transaksi secara aman, terdesentralisasi, transparan, dan aman. Teknologi yang dimaksud pada awalnya dikenal sebagai infrastruktur mata uang digital seperti Bitcoin, namun kini memiliki potensi yang jauh lebih besar di berbagai bidang, termasuk Administrasi Negara.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan teknologi blockchain dapat memperbaiki efisiensi proses penyaluran bantuan sosial?
2. Apa saja hambatan yang akan muncul ketika menerapkan teknologi blockchain dalam konteks penyaluran bantuan sosial?
3. Bagaimana dampak penggunaan blockchain memengaruhi keterbukaan, transparansi, keamanan, dan ketepatan data dalam penyaluran bantuan sosial?

1.2 TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas dan potensi penerapan teknologi blockchain dapat efektif dalam meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial

2. Menganalisis hambatan-hambatan yang mungkin muncul saat menerapkan teknologi blockchain dalam konteks bantuan sosial.
3. Mengidentifikasi dampak positif yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi blockchain terhadap keterbukaan, keamanan, serta ketepatan data dalam penyaluran bantuan sosial.

1.3 MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial untuk memahami potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan efisiensi proses ini.
2. Mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul selama implementasi blockchain, dengan demikian membantu dalam menghindari atau mengatasi hambatan yang mungkin timbul.
3. Meningkatkan transparansi dan keamanan dalam penyaluran bantuan sosial, yang dapat menghasilkan manfaat bagi para penerima bantuan dan organisasi yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA :

- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95-107
- Maulani, I. E., Herdianto, T., Syawaludin, D. F., & Laksana, M. O. (2023). Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Keamanan Informasi. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 3(2), 99-102
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102
- Suminar, L. R., & Nugroho, A. A. (2023). ADOPSI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DI SEKTOR PUBLIK: PELUANG PEMBENTUKAN SISTEM IDENTITAS DIGITAL NASIONAL DI ERA VUCA. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4/Januari).
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55-68.
- Wardhani, P. R., & Nasution, M. I. P. (2023). Peran Teknologi Blockchain dalam Keamanan dalam Privasi Data. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 3897-3905.
- Wati, H. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung
- Yulianton, H., Santi, RCN, Hadiono, K., & Mulyani, S. (2018). Implementasi blockchain yang sederhana.